

TESIS
PENGARUH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA



ABDIRUN LUGA HARLIANTO

No. Mhs : 061108/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ABDIRUN LUGA HARLIANTO
Nomor Mahasiswa : 061108/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di
Indonesia

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Prof. Dr. F. Soegeng Istanto, SH

TTD

St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ABDIRUN LUGA HARLIANTO
Nomor Mahasiswa : 061108/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Nama Penguji Tanggal Tanda Tangan

Dr.Drs.Paulinus Soge SH.MHum

Anny Retnowati, SH.M.Hum

St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum

Ketua Program Studi

PROGRAM
PASCASARJANA
Prof. Dr. MG Endang Sumiarni, SH., M.Hum

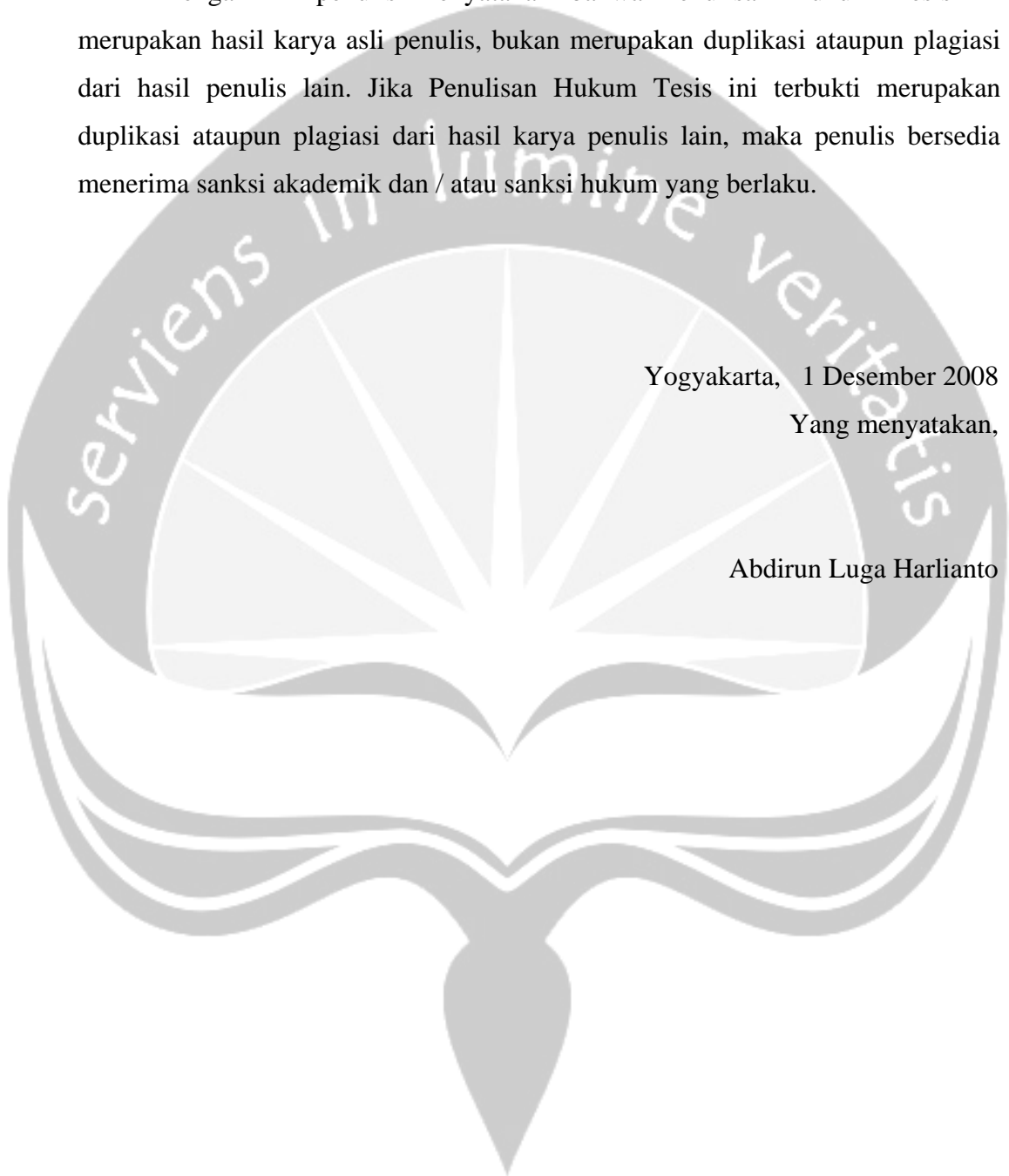
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum Tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika Penulisan Hukum Tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Desember 2008

Yang menyatakan,

Abdirun Luga Harlianto



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala mujizat dan kuasanya yang begitu luar biasa dalam kehidupan penulis sehingga pada waktu yang telah direncanakan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul " Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". Tesis tersebut disusun untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna maka dengan rendah hati penulis menerima saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Prof. Dibyو Prabowo, M.Sc selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. MG Endang Sumiarni, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum yang begitu sabar dalam membimbing penulis dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sugeng Istanto, S.H.,M.H (alm) selaku dosen pembimbing I yang begitu bijaksana, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk penulis.

5. Bapak St. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing II yang bijak dan sabar dalam membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr.Drs.Paulinus Soge SH.MHum dan Ibu Anny Retnowati, SH.M.Hum atas kesediaan waktu dan bimbingannya dalam menguji penulis dalam ujian pendadaran tesis ini
7. Ibu Loeke Larasati A., SH., MM, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta atas perkenannya kepada penulis untuk meluangkan waktu kerja penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini
8. Bapak Agus Riswanto, SH., MH, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terima kasih atas perkenan dan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini semasa masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
9. Bapak H. R. Hutagalung SH., CN selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Bapak Isharianto, SH., M.Hum, selaku Dosen Pasca Sarjana Program MIH Univ Gajah Mada Yogyakarta, terima kasih atas perkenannya meluangkan waktunya untuk memberikan data / wawancara kepada penulis
10. Orang tua tercinta, H. Banjar Nahor, S.H.dan D. Lumban Gaol yang dengan cinta kasih selalu menyemangati dan memberi dukungan baik materiil maupun immateriil.

11. Mardiana Martha Priska SE, Widya Astuti dan Rafles Junarto Poltak
Manondang kakak dan adik-adik dengan setia selalu mendoakan dan menyemangati serta senantiasa menghibur dalam duka
12. Lenny Marta Barimbing, SH yang dengan setia dan sabar dengan cinta kasihnya mendukung penulis dan tidak kenal lelah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
13. Happy, Yosi, Betsy dan Dede, Kak Sara, terima kasih atas dukungan dan semangatnya selama ini.
14. Teman-teman selama kuliah baik S1 maupun S2 dan admisi pasca sarjana UAJY yang membuat betah di kampus dengan joke dan keceriaannya.
15. Sahabat dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat ditulis satu persatu karena keterbatasan tempat, terima kasih banyak atas segala dukungan doa dan semangat.

Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat dan anugrah kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini tidak sia-sia begitu saja namun dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum di Indonesia khususnya bidang ekonomi dan bisnis.

Yogyakarta, 1 Desember 2008

Penulis

INTISARI

Tesis ini mengambil judul "Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi pengaruh KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari hasil evaluasi tersebut akan ditemukan saran bagaimana seharusnya KPK dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam menjelaskan pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut penulis mengaitkannya dengan semangat pemberantasan korupsi sebagaimana tersirat dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU tersebut, pemberantasan korupsi ditujukan pada 3 hal yaitu, melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi, melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan juga mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dari sisi jumlah kasus yang ditindak oleh KPK, KPK belum berpengaruh besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun berdasarkan kasus-kasus yang ditindak oleh KPK, koruptor-koruptor kelas kakap, baik dari nilai kerugian negaranya maupun dari ketokohnya berhasil ditindak oleh KPK. Dari penindakan tersebut, KPK memberi pengaruh yaitu mengembalikan kepercayaan masyarakat akan hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, dan optimalisasi kinerja aparat hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam hal pengembalian kerugian negara, KPK belum berpengaruh besar dalam mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Dalam hal pencegahan, KPK telah berhasil secara optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

Kata Kunci : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan, Penindakan, Pengembalian Kerugian Negara

ABSTACT

This thesis is entitled “The Effect of *Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK) in Eliminating Corruption Criminal Act in Indonesia”. This research aimed to describe and evaluate the effects of KPK in order to eliminate the corruption in Indonesia. From the result of this evaluation it will found any suggestion on how the KPK should behalf in the pace of eliminating the corruption in Indonesia.

In explaining the effects of Commission of Corruption Eliminator, the author relates to the spirit of corruption elimination as explicated in the Law Number 31 of 1999 junction the Law Number 20 of 2001 on the Elimination of Corruption Criminal Act. In these laws, the elimination of corruption is purposed to three primary matters, i.e. conduct the prevention of corruption criminal act, and conduct taking measure toward the perpetrator of corruption criminal act and also to compensate the state’s loss as the consequences of corruption criminal act.

From the result has been conducted, it gained result that from perspective of total case has been taken steps by KPK, KPK have not give big influence in the elimination of corruption in Indonesia. However, based on the cases had been taken steps by KPK, big-classed corruptors, either from the value of state’s loss or even from its figure had successfully been taken steps by KPK. From this taking measure, KPK gives influences, i.e. to relieve the confidence of society to the law in Indonesia in eliminating the corruption criminal act, and optimization of the performance of legal apparatus that has authority in eliminating the corruption criminal act, i.e. Police and Attorney. In the matter of compensating the state’s loss, KPK has not given big influence in compensating the state’s loss as the consequences of corruption criminal act. In preventive matters, KPK has successfully and optimally conduct any prevention toward the corruption criminal act.

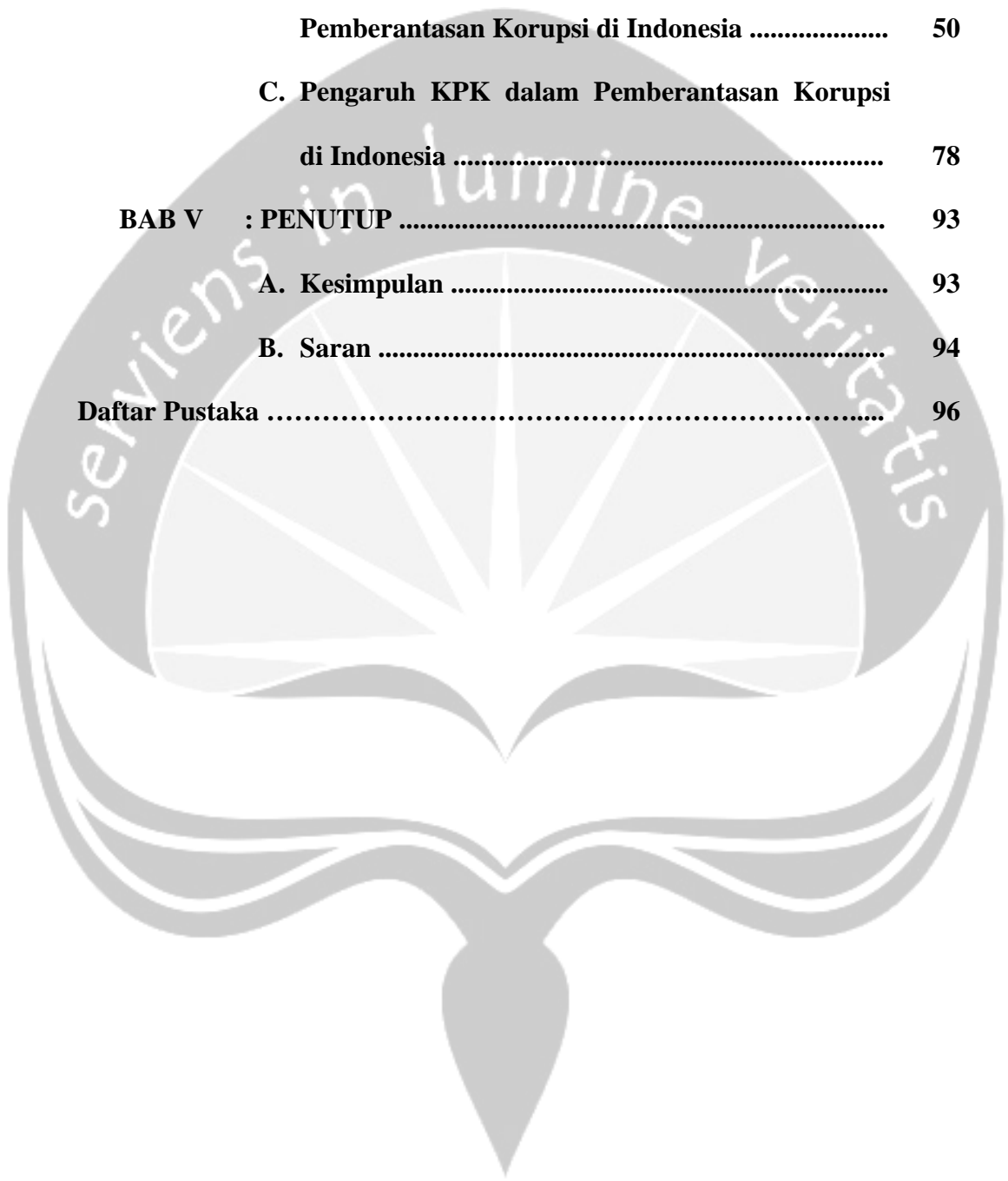
Keywords : Eliminating Corruption Criminal Act, The Prevention, Taking Measure, Compensate The State’s Loss

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Dosen Penguji	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1.Rumusan Masalah	8
2.Batasan Definisi Operasional	8
3.Keaslian Penelitian	10
4.Manfaat Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	13
1.Landasan Teori	13

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dan Keberadaan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	15
3. Pengaturan Tindak pidana korupsi dalam Perundang-Undangan di Indonesia	20
B. Komisi Pemberantasan Korupsi	37
1. Landasan Teori	37
2. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	38
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Data	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV : PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	44
A. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	44

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	50
C. Pengaruh KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	78
BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
Daftar Pustaka	96



DAFTAR TABEL

TABEL 1	: REKAPITULASI TEMUAN KORUPSI 1993/1994 – 1998 / 1999	3
TABEL 2	: PENINGKATAN JUMLAH KASUS KORUPSI DAN JUMLAH KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI (2004-2006)	6
TABEL 3	: PERINGKAT KORUPSI NEGARA INDONESIA	6
TABEL 4	: PERINGKAT KORUPSI NEGARA INDONESIA	17
TABEL 5	: TREND KEBERADAAN KORUPSI DI INDONESIA ...	18
TABEL 6	: TREND MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	18
TABEL 7	: PEGAWAI NEGERI YANG MENYERAHKAN LHKPN	65
TABEL 8	: PENERIMAAN LAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI OLEH KPK	66
TABEL 9	: PELAKSANAAN PENINDAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KPK	76
TABEL 10	: DATA TUNTUTAN DAN VONIS PERKARA KORUPSI YANG DITANGANI KPK (TAHUN 2006)....	82
TABEL 11	: DATA TUNTUTAN DAN VONIS PERKARA KORUPSI YANG DITANGANI KPK (TAHUN 2007)....	85
TABEL 12	: PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA OLEH KPK.	90